

Bisa dikatakan, model pembangunan pro pertumbuhan yang meyakini terjadinya “efek tetesan ke bawah (*trickle down effect*)” ternyata tidak mampu mengangkat kesejahteraan penduduk miskin. Sebaliknya, yang terjadi justru penyedotan ke atas (*trickle up effect*) atau malahan akan terjadi penyedotan *produksi (production squeeze)*. Hal ini terjadi karena program-program pembangunan direncanakan secara terpusat (*top-down*), yang sering kali tidak sesuai dengan masalah-masalah yang dihadapi dan kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat bawah yang menjadi tujuan pembangunan. Selain itu para perencana dan penentu kebijakan yang menggariskan sasaran pembangunan dan mengalokasikan sumber dana sering berada di bawah situasi tekanan situasi untuk memproduksi hasil kuantitatif dalam waktu singkat, sehingga mereka cenderung menekankan sasaran-sasaran dari atas (Sutoro Eko, 1994: 4). Keadaan ini sangat wajar jika program-program pembangunan pro pertumbuhan tidak berdampak besar dalam memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat lapis bawah. Akibatnya, segmen masyarakat yang miskin tetap dalam kondisi miskin, bahkan ada yang bertambah miskin, sedangkan kelompok masyarakat yang kaya bertambah kaya.

Pendekatan pembangunan yang bersifat *top-down* seperti ini tidak mencerminkan keberpihakan pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Akibatnya, hasil dari program-program pembangunan yang dilancarkan tidak berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kalangan miskin, meskipun telah menghabiskan biaya yang besar.

Dari sejumlah pengamatan, terungkap bahwa kebanyakan aktivis LSM tidak memaksakan program-program secara sepihak, namun program-program disusun berdasarkan analisis terhadap kebutuhan riil masyarakat. Secara teoritis, proses ini sering disebut *community needs assessment*. Konsep *community needs assessment* dikonseptualisasikan sebagai proses penilaian terhadap situasi masyarakat pada saat ini, perumusan pendapat berdasarkan penilaian terhadap keadaan yang diinginkan atau disukai warga, dan membuat keputusan terhadap prioritas status kebutuhan warga (Keith A. Carter dan Lionel J. Beaulieu, 1992: 1). Kebutuhan (*need*) adalah kesenjangan antara situasi yang sedang terjadi dan situasi yang seharusnya terjadi. Sebuah kebutuhan dapat dirasakan oleh perorangan, kelompok, atau seluruh anggota masyarakat. Kebutuhan bisa dirasakan secara konkret, seperti kebutuhan akan air dan makanan serta kebutuhan

abstrak seperti pengembangan kerukunan anggota masyarakat. Oleh karena itu, perlu proses penilaian kebutuhan-kebutuhan tersebut supaya membantu kita menemukan kebutuhan-kebutuhan riil warga dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

Kebanyakan pekerja sosial menyusun kegiatan pembangunan masyarakat melalui beberapa langkah secara bertahap sesuai kondisi dan kebutuhan warga yang menjadi sasaran kegiatan. Langkah-langkah penyelenggaraan program itu setidaknya-tidaknnya meliputi enam tahap. *Pertama*, tahap *problem posing* (pemaparan masalah) yang dilakukan aktivis dengan mengelompokkan dan menentukan masalah-masalah dan persoalan-persoalan yang dihadapi warga dari kelompok sasaran. Warga masyarakat umumnya menyadari permasalahan-permasalahan mereka sendiri meskipun hal itu tidak diungkapkan. Peran pekerja sosial ketika dalam tahapan ini berjalan adalah memberi penjelasan, informasi, dan memfasilitasi kegiatan musyawarah atau diskusi di antara warga dari kelompok sasaran.

Kedua, tahap *problem analysis* (analisis masalah). Tahap ini dilakukan oleh pekerja sosial dengan mengumpulkan informasi mulai dari jenis, ukuran, dan ruang lingkup permasalahan-permasalahan yang dihadapi warga dan membuat informasi tersebut dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Ketiga, tahap penentuan tujuan (*aims*) dan sasaran (*objectives*). Tujuan menunjuk visi, tujuan jangka panjang dan statemen tentang petunjuk umum. Contoh pembangunan masyarakat yang dirumuskan oleh pekerja sosial adalah pembentukan kehidupan masyarakat di mana seluruh warganya terlibat secara aktif dalam program untuk mempertahankan sistem lingkungan dan membuat faktor sosial, ekonomi, dan politik yang dapat menjamin persamaan secara maksimal di kalangan warga untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dasar dan pelayanan.

Sementara sasaran bersifat lebih khusus dibandingkan tujuan, para pekerja sosial menetapkan apa yang mereka percayai akan dapat dicapai dan kemudian menyusun proses dan tugas-tugas khusus. Sasaran yang ditetapkan terdiri atas kegiatan-kegiatan yang dapat diidentifikasi, dianalisis, dan diungkapkan secara jelas kepada warga. Seperti halnya tujuan, sasaran tidak dirumuskan sekali untuk selamanya. Sebaliknya, sasaran sering dimodifikasi atau kadang-kadang diperbarui sebagai strategi menghasilkan cahaya baru terhadap permasalahan yang dihadapi dan mengarahkan untuk berpikir tentang

permasalahan-permasalahan dengan cara-cara berbeda. Sasaran mungkin berjangka panjang, menengah, dan pendek. Sasaran jangka panjang secara umum menuntut sejumlah strategi berbeda dan sering disusun dalam berbagai tahap. Sasaran jangka menengah dan pendek berskala lebih kecil lagi. Dalam memahami dan menjelaskan tujuan dan sasaran jangka panjang, menengah, dan pendek, kita bergerak dari sesuatu yang luas dan dar sesuatu yang abstrak ke konkret.

Keempat, tahap *actions plans* (perencanaan tindakan). Tahap ini dilakukan oleh pekerja sosial dengan kegiatan perencanaan berbagai aksi untuk mencapai tujuan. Dalam merencanakan aksi, pekerja sosial memerhatikan tenaga kerja, peralatan, jaringan sosial, dana, tempat, informasi, waktu tersedia, faktor-faktor penghambat, faktor-faktor pendukung, permasalahan-permasalahan *stakeholders*, tugas-tugas nyata yang dilakukan, pihak-pihak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil, pemain-pemain kunci baik secara individual dan kelompok, dilema atau kontradiksi atau ketegangan antara alat dengan tujuan, dan hasil-hasil yang mungkin dicapai.

Kelima, tahap pelaksanaan kegiatan. Tahap ini dilakukan oleh pekerja sosial dengan mengimplementasikan langkah-langkah pembangunan masyarakat yang telah dirancang. Para aktivis ketika dalam tahapan ini dituntut untuk memperhitungkan konsekuensi yang mungkin timbul sebagai akibat dari aksi yang dilakukan.

Keenam, tahap evaluasi yang dilakukan oleh pekerja sosial secara terus-menerus baik secara formal atau semi formal pada akhir proses pengembangan masyarakat, maupun secara informal dalam setiap bulan, mingguan, dah bahkan harian.

Sumber:

Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat / Dr. Zubaedi, M. Ag. , M. Pd. / Jogjakarta / Ar-Ruzz Media, 2007